

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan keberhasilan layanan pendidikan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Urgensi komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan komponen produktif dan strategis yang menentukan terlaksananya layanan pendidikan. Makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan. (Fermayani et al., 2023)

Dalam perencanaan keuangan Semua pihak manajemen sekolah yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sekolah membentuk rapat penyusunan rencana anggaran baik pihak manajemen, komite, termasuk memasukkan tenaga pengajar (guru), akan menguntungkan semua pihak karena anggaran kegiatan untuk setiap sektor akan lebih dekat dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk kegiatan di setiap bidang di sekolah. Keterlibatan komponen sekolah mendorong partisipasi aktif melalui saran, pendapat, pengawasan pelaksanaan, komitmen, dan pengendalian anggaran, yang dapat menghasilkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta peningkatan kepuasan kerja dan produktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Halimah et al., 2023)

Sebagai upaya pengawasan transparansi pengelolaan dana keterlibatan guru sebagai salah satu komponen sekolah yang akan melakukan supervisi dan pengawalan sebagai bagian dari sekolah yang mempunyai pengaruh dalam pencapaian tujuan bersama sangat diperlukan untuk penggunaan dana dalam perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan. Tanggung jawab dan peran utama guru adalah dalam kegiatan belajar-mengajar (KBM), tetapi administrasi sekolah sangat penting untuk pengoperasian KBM yang tepat, serta pencapaian tujuan pembelajaran dan kualitas sekolah. Guru memiliki kesempatan terbesar

untuk berpartisipasi secara aktif dalam manajemen sekolah, meskipun ketidakmampuan mereka untuk memberikan dampak yang signifikan pada pilihan. Karena dana tidak dapat diabaikan dari seluruh pendidikan di sekolah, salah satu cara yang paling signifikan bagi guru untuk berpartisipasi adalah dalam penyusunan dan pengawasan anggaran sekolah. (Hidayat & Suryono, 2014) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggungjawab menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sehingga lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. Arti pendidikan ini dijabarkan secara lebih spesifik lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yaitu pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan pekerjaan. Kekhususan dalam pembelajaran di SMK bukan hanya dengan adanya pembelajaran kompetensi keahlian yang mampu membekali siswa agar siap kerjadi dunia usaha dan industri (DU/DI) tetapi dengan adanya relevansi SMK dengan DU/DI guna mencapai tujuan terciptanya mutu lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Hal ini didasarkan dari kebijakan pemerintah tentang link and match DU/DI dengan penyelenggaraan pendidikan di SMK agar dari kedua belah pihak saling mengerti apa saja yang dibutuhkan oleh DU/DI dan apa yang seharusnya dilakukan oleh SMK dalam menanggapi kebutuhan dari DU/DI yang semakin berkembang pesat dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Program Praktek Kerja Industri (Prakerin) adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan relevansi antara SMK dan DU/DI. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bertugas mendidik generasi penerus bangsa, seharusnya menjadi sumber perhatian komponen sekolah, khususnya guru, karena sekolah dan komponennya memikul tanggung jawab yang cukup besar dalam pelaksanaannya, termasuk transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, penggunaan BOS di sekolah juga penting, yang harus diputuskan oleh Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah secara bersama-sama. Penyerapan dana BOS

harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah, dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Raport Mutu sekolah sebagai acuannya. Sekolah wajib menyelenggarakan pembukuan secara utuh dalam rangka pengelolaan BOS sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola dan tanggung jawab lembaga pengelola keuangan. Dengan kebutuhan tersebut, diperlukan peran sistem informasi berbasis komputer sebagai solusi regulasi dan tantangan pengelolaan keuangan sekolah. Selain menjadi alat pemecahan masalah, teknologi informasi dapat membantu mengurangi waktu kerja sekaligus menghasilkan hasil yang benar atau valid. (Jl et al., 2024)

Guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah telah melakukan berbagai terobosan dan akselerasi dalam upaya meningkatkan mutu satuan pendidikan salah satunya yaitu Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di tahun 2022. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat Aplikasi RKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. (Intan & Zulkarnain, 2023)

Dalam dunia pendidikan, penerapan (ARKAS) aplikasi rencana kerja anggaran sekolah sangat penting dalam pengelolaan dana BOS, organisasi sekolah akan kesulitan menempatkan dana BOS jika tidak menggunakan aplikasi seperti (ARKAS). (Mashar, 2019). Upayah tim sekolah dalam mengelola dan BOS masih di tempat yang salah, karena manajemen tidak menggunakan metode atau aplikasi yang dapat membantu (Sari, 2021). Dalam menyusun anggaran BOS sekolah terdapat tiga poin pokok anggaran yang harus dipertanggungjawabkan yaitu Anggaran Belanja Pegawai. Dalam komponen anggaran belanja pegawai meliputi honorium panitia pelaksana kegiatan, honorium tenaga pendidikan, honorium guru tidak tetap. Anggaran Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang

antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis dipakai, penggantian inventaris kantor, dll (Lestari et al., 2023) dan Anggaran Belanja Modal, terkait erat dengan akun aset tetap, karena hasil dari belanja modal akan menjadi aset tetap (Berliani et al., 2024). Namun, masalah dalam administrasi dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sering terjadi. Menurut penyelidikan Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah (Fauzan,2014), nilai penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sekitar 28 miliar pada sampel 3.237 sekolah di 33 provinsi. Deviasi rata-rata setiap individu.

Sekolah menyumbang 13,6 juta siswa dan 2.054 (atau 63,5%) dari keseluruhan sampel sekolah yang diaudit. Menurut data kejaksaan dan kepolisian di Indonesia, 33 kasus korupsi yang melibatkan dana bantuan operasional sekolah dituntut antara tahun 2004 dan 2009. (BOS). Dalam situasi ini, negara mengalami kerugian sekitar Rp. 12,8 miliar. Harus diakui, masalah utama dana BOS terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan. Selama ini, keterlambatan transfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajer BOS daerah.(Lestari et al., 2023)

Keberangkatan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) disebabkan oleh kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, serta belum optimalnya penerapan sistem transparansi, akuntabilitas, dan akuntabilitas di sekolah. Masalah lain yang sering muncul antara lain kurangnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima oleh beberapa sekolah, ketidakmampuan guru sebagai bendahara dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), kegagalan sekolah untuk memberikan laporan penggunaan tepat waktu. dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan fakta bahwa banyak sekolah tidak ingin masyarakat mengetahui laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS)(Sopian & Asqolani, 2022) Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS) yang tidak dilaksanakan dengan baik, mengakibatkan pengelolaan sekolah menjadi buruk. Permasalahan yang dihadapi manajemen sekolah bermula dari

kegagalan tim manajemen sekolah dalam menyusun Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS) dengan baik. Pengelola sekolah kesulitan mengelola dana BOS yang ada. Karena dana BOS dikelola secara manual tanpa menggunakan metode atau aplikasi apapun dalam mengarahkan dana BOS untuk keperluan sekolah, dana BOS yang ada beroperasi tanpa akuntabilitas atau transparansi. (Yulyanti et al., 2022)

Aplikasi ARKAS memiliki peran sebagai sistem perencanaan anggaran BOS sekolah yang dirancang sesuai rincian standar pembiayaan pendidikan sekolah dan terintegrasi secara terpusat dengan sistem BOS salur Kemedikbud langsung. Fungsi dari ARKAS adalah sebagai sistem pengendali dan pengawasan atas perencanaan dan realisasi belanja anggaran sekolah secara real time dan transparan agar kualitas laporan bos tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan. (Halimah et al., 2023)

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari variabel penerapan sistem informasi akuntansi aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (Arkas) terhadap variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan BOS dan Transparansi Laporan Keuangan BOS. Penggunaan RKAS partisipatif dengan jaminan akuntabilitas membantu pelaksanaan rencana dan pencapaian tujuan pendidikan. Partisipasi dalam penganggaran uang ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, kepemilikan, dan semangat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan kepuasan kerja yang membantu pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan undang-undang. Namun pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kota Bandar Lampung masih belum menggunakan program Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana bos. Ditahun 2022 baru diterapkan wajib melakukan pelaporan menggunakan Aplikasi RKAS. Penggunaan aplikasi rencana kerja anggaran sekolah memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan organisasi dengan menggunakan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian, sehingga menghasilkan hasil terbaik dan rasa pencapaian di kerja.

Kepuasan kerja akan meningkat sebagai akibat dari keterlibatan yang tinggi dalam penggunaan aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), yang akan berdampak pada kualitas pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan. Dampak pemanfaatan aplikasi ARKAS (Rencana Anggaran Kerja)

Sejalan dengan salah satu misi dari visi misi kota Bandar Lampung yaitu Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat (bandarlampungkota.go.id) dan tujuan penerapan ARKAS adalah semua pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan akan lebih transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. ARKAS juga memberi kemudahan administratif, utamanya terkait rekapitulasi keuangan satuan pendidikan. Sehingga, satuan pendidikan akan lebih mudah dalam mengelola manajemen keuangan demi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Dari uraian Visi Misi Kota Bandar Lampung dan tujuan penerapan ARKAS terdapat satu tujuan yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan demikian Dinas Pendidikan kota Bandar Lampung menghimbau kepada tim BOS sekolah untuk menerapkan Sistem Informasi Akuntansi ARKAS dalam pelaporannya. Upaya pemerintah melalui dinas pendidikan Provinsi Lampung untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam penatausahaan keuangan laporan BOS memberikan surat tugas kepada bendahara BOS Kota Bandar Lampung untuk mengikuti Diklat, pelatihan tersebut pada tanggal 04 Oktober 2021 di gedung BPDSM Pemprov Lampung.

Berdasarkan sumber informasi data dapodik bahwa kota Bandar Lampung memiliki jumlah penerima 62 bantuan operasional Sekolah tingkat SMK yang terdiri dari 10 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan 52 Sekolah Menengah Kejuruan swasta. Dari 52 sekolah swasta di Bandar Lampung terdapat 2 sekolah yang tidak mengajukan Bantuan Operasional Sekolah ke Pemerintah. Jadi terdapat 50 sekolah di SMK swasta yang diminta melakukan pertanggungjawaban Laporan keuangan BOS dikendalikan secara transparan sehingga tidak terjadi penyimpangan sosial di dalam lingkungan sekolah. Diharapkan sekolah dapat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kolaboratif yang sistematis.

Sejalan dengan hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis mengadakan penelitian tentang **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS) TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA BOS SMK DI KOTA BANDAR LAMPUNG** “.Pentingnya penelitian ini dalam dunia pendidikan, guna menemukan metode atau penerapan yang efektif dalam pengelolaan dana.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini ditetapkan agar dalam penelitian fokus terhadap pokok permasalahan dan pembahasannya sehingga diharapkan penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh penggunaan Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS) terhadap akuntabilitas penggunaan dana BOS pada Tahun 2022.
2. Objek peneliti adalah Bendahara Sekolah SMK yang ada di Kota Bandar Lampung.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS) terhadap akuntabilitas penggunaan dana BOS SMK di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah terdapat pengaruh penggunaan aplikasi rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS) terhadap transparansi penggunaan dana BOS SMK di Kota Bandar Lampung?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS) terhadap akuntabilitas penggunaan dana BOS SMK di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS) terhadap transparansi penggunaan dana BOS SMK di Kota Bandar Lampung

1.5. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini tentunya untuk memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori di dalam ilmu pengetahuan tentang Program Sistem Informasi Akuntansi Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).

1.5.2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan daya nalar, sehingga dapat memahami aplikasi dan teori yang telah dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan informasi yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan, perbandingan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Bendahara BOS Sekolah, penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait kualitas laporan pertanggungjawaban BOS sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri dari beberapa Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang yang menjelaskan secara singkat mengenai gambaran umum aplikasi ARKAS, tujuan penyusunan laporan, manfaat penyusunan laporan, rumusan masalah pada laporan, serta sistematik penulisan laporan ini sendiri.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas kajian pustaka yang penulis gunakan saat penyusunan penelitian, beserta hasil penelitian yang relevan dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini beserta analisisnya sesuai rumusan masalah yang penulis tentukan agar terjawab segala permasalahan yang tertuang dalam penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.